

ABSTRAK

Roby Mauludin (2022): Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kuningan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kuningan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan tidak mampu menutupi biaya belanja daerah yang meningkat setiap tahun dan masih bergantung pada *share* dana Pemerintah Pusat. Secara akademik, permasalahan ini memberikan ruang untuk ditinjau oleh pendekatan Siyasah Maliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kabupaten kuningan, mengetahui hambatan dan kebijakan bpkad dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di kabupaten kuningan, kemudian mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah di kabupaten kuningan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga. *Pertama* teori pengelolaan keuangan daerah. *Kedua*, teori *good governance* untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang terdapat dalam sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah. *Ketiga*, teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) dalam kajian Siyasah Maliyah untuk meninjau tata kelola keuangan dan aset daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kuningan dan mendeskripsikan Siyasah Maliyah sebagai tinjauannya. Teknik pengumpulan data digunakan dalam bentuk wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Penelitian ini menyimpulkan (1) Secara struktural, sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh BPKAD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tata kelola keuangan dan aset (2) Faktor penghambat dalam tata kelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kuningan adalah alokasi penggunaan anggaran terlalu besar pada belanja daerah dalam bentuk belanja pegawai yang mencapai 55% dari total pendapatan, selain keterbatasan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (3) Berdasarkan tinjauan teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) dalam Siyasah Maliyah sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kuningan tidak mengarah pada kebijakan penjaminan sosial dan keseimbangan sosial (menciptakan keberdayaan masyarakat), karena prioritas alokasi anggaran tidak untuk pemberdayaan masyarakat melainkan tergerus untuk memenuhi belanja pegawai, sehingga tidak terjadi timbal balik masyarakat.

Kata kunci : *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Siyasah Maliyah*